






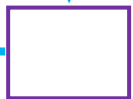
Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul
 Nomor : 038 Tahun 2021
 Tanggal : 03 Desember 2021

Nomor SOP	038
Tanggal Pembuatan	03 Desember 2021
Tanggal Revisi	-
Tanggal Pengesahan	03 Desember 2021
Disahkan oleh	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Nama SOP : PERSETUJUAN KESesuaIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG (KKPR)	

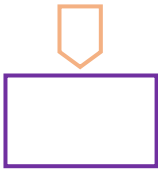






**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
KABUPATEN BANTUL**

<p>Dasar Hukum :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Tata Ruang; 2. Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang dan Badan Pertanahan Negara Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pertimbangan Teknis Pertanahan; 3. Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang dan Badan Pertanahan Negara Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang 4. Surat Edaran Menteri ATR-BPN Nomor 4 tahun 2021 tentang Pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang di daerah; 5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2011-2030; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perumahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perumahan; 7. Peraturan Bupati Kabupaten Bantul Nomor 122 Tahun 2021 tentang pencabutan Peraturan Bupati Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun 2021 tentang Izin Lokasi dan Izin Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah; 8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Dan Non Perizinan. 	<p>Kualifikasi Pelaksana :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami peraturan dasar hukum pelayanan perizinan (SMA/D-3/S1). 2. Memahami jenis-jenis perizinan (SMA/D-3/S-1). 3. Memahami prosedur pelayanan perizinan (SMA/D-3/S-1). 4. Memahami standar teknis pelayanan (SMA/D-3/ S-1).
<p>Keterkaitan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Sertifikat Laik Fungsi (SLF) 2. SOP Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) 3. SOP Perizinan Bidang Perindustrian. 4. SOP Perizinan Bidang Perdagangan. 5. SOP Perizinan Bidang Usaha Pariwisata. 6. SOP Perizinan Bidang Konstruksi. 	<p>Peralatan/Perlengkapan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer 2. SIM Perijinan 3. Printer 4. Kendaraan Bermotor (Roda 4 dan Roda 2). 5. Kamera 6. Alat Ukur (GPS, Meteran) 7. ATK 8. Perlengkapan lain-lain.
<p>Peringatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perlu ketelitian dalam pemeriksaan berkas permohonan. 2. Perlu ketelitian dalam memverifikasi data pada saat survei lokasi. 3. Perlu obyektif dalam menyusun kajian teknis/administrasi dalam rangka penetapan izin. 	<p>Pencatatan dan Pendataan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Formulir permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR). 2. Berkas permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR). 3. Berita Acara Tinjauan Lapangan. 4. Berita Acara Kajian Teknis/Administrasi.

No	Uraian Prosedur	Pelaksana						Mutu Baku			
		Aplikasi Izinonline	Sub. Koord. Pelayanan Non Perizinan	DPTR	Sekretaris	Koordinator PTSP I	Kepala Dinas	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1	Permohonan PKKPR melalui izinonline.bantulkab.go.id							Aplikasi Izinonline	10 Menit	Terunggahnya berkas persyaratan permohonan PKKPR	
2	Periksa kelengkapan berkas persyaratan							Berkas persyaratan Permohonan KKPR pada	10 Menit	Tervalidasinya berkas pemohon	
3	Persyaratan tidak lengkap dikembalikan ke pemohon Persyaratan benar & lengkap diteruskan ke Dinas Pertanahan dan Tata Ruang							Berkas persyaratan Permohonan PKKPR	10 Menit		Berkas yg tdk lolos validasi diinformasikan kpd pemohon melalui aplikasi izinonline
4	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang melakukan kajian dan selanjutnya memberikan memproses rekomendasi FPRD (Forum Penataan Ruang Daerah)							Berkas Permohonan PKKPR	1 Jam	Berita Acara Kajian Teknis/Administrasi dan Rekomendasi atas permohonan PKKPR	
5	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang menerbitkan Rekomendasi FPRD							Rekomendasi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang atas permohonan PKKPR	1 Jam	Berita Acara Kajian Teknis/Administrasi	



No	Uraian Prosedur	Pelaksana						Mutu Baku			
		Aplikasi Izinonline	Sub. Koord. Pelayanan Non Perizinan	DPTR	Sekretaris	Koordinator PTSP I	Kepala Dinas	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
6	Memverifikasi Rekomendasi FPRD							Aplikasi Izinonline	10 Menit	Berita Acara Kajian Teknis/Administrasi dan Rekomendasi, terverifikasi	
7	Menetapkan PKKPR							Aplikasi Izinonline	10 Menit	PKKPR ditetapkan.	
8	Kepala Dinas melakukan tanda tangan digital dan nomor terbit secara otomatis							Berkas persyaratan Permohonan KKPR	10 Menit	PKKPR ditandatangani.	
9	Pemohon mengisi SKM dan mengunduh PKKPR							Aplikasi Izinonline		Formulir SKM Terunggah dan PKKPR Terunduh	
10	Mengirimkan salinan kepada instansi/pihak terkait dan pemohon melalui aplikasi izinonline							Salinan dokumen Persetujuan permohonan PKKPR	1 Hari	Diterimanya salinan Persetujuan KKPR permohonan KKPR	



Ditetapkan di Bantul
Pada Tanggal 03 Desember 2021

Ir. Sri Muryuwantini, M.M.
NIP. 196203091989032002